PERINGATI 10 TAHUN OMBUDSMAN RI BABEL, PENINGKATAN AKSES PELAYANAN PUBLIK BUTUH PERAN SEMUA PIHAK

Senin, 28 Agustus 2023 - Agung Nugraha

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan, tercapainya peningkatan akses pelayanan publik membutuhkan peran serta semua pengguna layanan.

Karena, lanjutnya, jika tanpa peran serta semua pihak menyuarakan tentang layanan kepada masyarakat, Ombudsman tidak berarti apa-apa.

"Jadi bagaimana kita harus memaksimalkan peran Ombudsman bagi pelayanan publik. Pas sekali hari ini dihadiri oleh wartawan, LSM, UMKM dan pihak-pihak terkait," kata Johanes saat menjadi narasumber diskusi publik yang digekar Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Auditorium Zahari MZ, Manggar, Jumat (25/8/2023).

Diskusi publik ini menjadi rangkaian acara dalam peringatan 10 tahun atau satu dekade Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widjantoro, Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu, Bupati Belitung Timur Burhanudin, hadir sebagai narasumber.

Sedangkan Ketua Ombudsman Bangka Belitung Shulby Yozar Ariadhy sekaligus menjadi moderator diskusi.

Di tempat yang sama, Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Suganda Pandapotan Pasaribu memaparkan program unggulan Pemprov Babel yakni Gule Kabung, yang ditujukan untuk memaksimalkan layanan masyarakat di wilayah Babel.

Dalam program Gule Kabung, kata Suganda, banyak hal muncul langsung dari masyarakat dan dapat segera ditindaklanjuti.

"Misalkan ada seorang bapak-bapak yang dalam setahun terakhir sakit-sakitan, hidup di rumah yang sangat tidak layak. Ada yang menyampaikan kepada saya dan langsung segera kita tindaklanjuti dan sekarang sudah dirawat di rumah sakit. Memaksimalkan pelayanan publik," kata Suganda.

Tantangan pelayanan publik menurut Suganda cukup kompleks hingga menyentuh berbagai sendi pelayanan.

Ia menyebut, tidak hanya bicara soal layanan rumah sakit, pembuatan KTP, SIM atau perizinan-perizinan saja, tapi hal lain juga seperti isu-isu perlindungan konsumen harus bisa dijawab pemerintah baik pusat maupun daerah melalui Ombudsman ini.

Sementara itu, Bupati Belitung Timur Burhanudin mengaku banyak mendapatkan laporan berbagai pihak terkait persoalan layanan publik yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Dan itu semua terutama yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik kita selesaikan segera," kata Burhanudin.

Burhanudin menyampaikan, untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat banyak hal yang harus menjadi catatan dan dilaksanakan setiap OPD.

"OPD harus mampu menjadi leadership yang baik dalam menyelesaikan permasalahan layanan publik di institusi masing-masing. Lalu pemanfaatan teknologi dan informasi juga harus benar-benar dimaksimalkan oleh ASN kita, serta para ASN juga harus mampu kreatif inovatif dalam memaksimalkan layanan publik, jadi harus berkembang, jangan kaku atau stagnan," kata Burhanudin.

(Posbelitung.co)

Penulis: Rusaidah | Editor: Novita